



Siti Aisyah¹
 Aqwa Naser Daulay²

ANALISIS SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) DAN PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI CABANG TANJUNG MORAWA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan implikasinya bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan yang telah menjadi peserta JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa. Salah satu metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yang meliputi reduksi data, display, dan penarikan simpulan/verifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan waktu pengajuan klaim yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa secara umum belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan masih adanya masyarakat yang tidak membaca Serat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi pada saat mengajukan klaim.

Kata Kunci: Sistem klaim, JHT, BPJS Cabang Tanjung Morawa

Abstract

The purpose of this study is to understand the system of claims for Jaminan Hari Tua (JHT) and its implications for those employed as employees who have already become JHT participants in BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa. One method of data analysis used by authors is the deskriptif kualitatif method, which involves data reduction, display, and conclusion drawing/verification. On the other hand, the data collection technique that has been completed through documentation and wawancara. The study's findings indicate that the system of claim timekeeping that exists at BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa is generally not in compliance with existing regulations. This stems from the fact that there are people who fail to read the Serat Keterangan Berhenti Bekerja or the Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi while making a claim.

Keywords: Claim system, JHT, BPJS Tanjung Morawa Branch

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu program yang telah dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mengurangi risiko terhadap cara hidupnya adalah sosialisasi. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan metode penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Sosial Departemen Penegakan Hukum, jaminan sosial merupakan program nasional yang dirancang untuk memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Jaminan sosial juga bertujuan untuk mencapai tujuan sistem jaminan sosial nasional, yang mengharuskan dibentuknya lembaga penegak hukum yang terdiri dari badan penegak hukum. Badan

¹ Progam Studi Asuransi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
 email: sityaisyah429@gmail.com, aqwanaserdaulay@gmail.com

Penyelenggara Jaminan Sosial yang kemudian menjadi bagian dari BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mengawasi program jaminan sosial (UU 24/2011).

Salah satu program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang hingga saat ini dianggap paling banyak manfaatnya oleh para pekerja BPJS Ketenagakerjaan adalah jurnal harian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hari Tua, program JHT merupakan manfaat berupa uang cuma-cuma yang diberikan ketika seorang peserta keluar dari golongannya, memutuskan untuk tidak bekerja kembali, atau masuk dunia kerja kembali. Seluruh uang tersebut selanjutnya ditahan sampai dengan peserta mencapai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara merupakan cabang perwakilan wilayah BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa. Sebagai pembina cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa menerima iuran dari peserta program jaminan, yang paling menonjol adalah Jaminan Hari Tua. Pembayaran klaim Jaminan Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara sayangnya berdasarkan prosedur yang ada, namun tidak terjamin dalam pelaksanaan prosedurnya, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Ibu Susy, Kepala Bidang Pelayanan, menyatakan bahwa peraturan baru tersebut sangat merugikan pekerja, terutama di bidang pelayanan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan yang mengajukan klaim. Oleh karena itu, kejadian ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi kami dalam memberikan dukungan yang tepat kepada setiap karyawan yang mengajukan klaim.

Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa manfaat puasa harian tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, sudah jelas bahwa manfaat program jurnal harian adalah membantu Anda mengelola waktu dengan lebih baik. Namun, jika ketentuan ini dipatuhi, setiap karyawan yang sudah berhenti bekerja akan dapat mengklaim atau menerima upah mereka untuk hari itu dan tidak lagi bergantung pada pemerintah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Deskriptif artinya mengonfirmasi jawaban responden terhadap setiap pertanyaan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, yang beralamat di JL. Raya Medan - Tanjung Morawa KM 14,5, LUBUK PAKAM 20362, TELP: 061-7941709, 7941882, FAKS: 061-7941712. Waktu penelitian adalah bulan Januari sampai dengan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada analisis sistem klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa. Berikut hasil dan pembahasannya yaitu :

1. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015. Banyak peserta yang tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi saat melakukan klaim, yang merupakan salah satu syarat penting dalam proses klaim.
2. Sistem klaim JHT yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara dinilai kurang efektif. Banyak peserta lebih memilih untuk melakukan klaim secara langsung di kantor cabang dibandingkan menggunakan metode lain seperti Service Point atau klaim online. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak BPJS mengenai prosedur klaim yang lebih efisien.
3. Penelitian juga menyoroti bahwa manfaat dari JHT akan lebih optimal jika klaim dilakukan pada usia tua, sesuai dengan tujuan program JHT itu sendiri. Selain itu, pendapatan dari bunga pengembangan saldo JHT akan menambah manfaat yang diterima peserta jika klaim dilakukan di masa tua, karena saldo akan terus berkembang meskipun peserta tidak lagi membayar iuran.

4. Terdapat kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, seperti banyaknya tenaga kerja yang tidak melengkapi dokumen yang diperlukan untuk klaim. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada peserta mengenai prosedur klaim yang benar.

Pembahasan

Pelaksanaan Sistem informasi Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang tanjung morawa

Ketentuan mengenai Sistem Manfaat Jaminan Hari Tua Pembayaran Manfaat yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara mengacu pada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Pengaturan Jaminan Hari Tua.

Manfaat jaminan hari ini adalah sebagai berikut: Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun).

1. Pekerja menyampaikan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir klaim yang dilampirkan pada dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Usia pensiun dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi, karena surat keterangan berhenti bekerja.
 - c. Fotokopi penduduk dan kartu keluarga.
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika transfer berkemisi beberapa pembayaran.
2. Upaya 54 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menghentikan pembayaran manfaat JHT, meneruskan kepesertaannya, serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja. Subyek memutilasi dirinya sebelum mencapai usia dewasa (56 tahun):
 - a. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan .
 - b. Sama dikatakan di ayat (1), masa tunggu satu bulan terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Pemohon meminta pembayaran JHT. Dengan mengisi formulir yang dilengkapi contoh dokumen sebagai berikut:
 - a. Peserta asli BPJS.
 - b. Keterangan pengunduran diri dari perusahaan dinasketenagakerjaan secara permanen dengan tembusan kepala BPJS TK.
 - c. Fotokopi Dan KK KTP
 - d. Ambil foto buku jika pembayaran dilakukan melalui bank
 - e. Persyaratan surat pengunduran diri wajib bagi yang mulai bekerja yang bersedia membayar tunjangan JHT Ketenaga kerjaan, pekerja dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan dapat diganti sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perselisihan perburuhan yang timbul.

Berdasarkan flowchat, tata cara penyampaian laporan harian sesuai saran Ibu Glisten Azuma sebagai customer service adalah sebagai berikut: Terkait pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, ada dua pilihan:

1. Yang baru didaftarkan Perusahaan dapat membuat formulir untuk kop surat perusahaan. Pendaftaran tenaga kerja setelah itu berapa jumlah karyawan dan berapa gaji karyawan tersebut. Setelah itu rekap baru dan dihitung, dikeluarkan surat penangihan iuran pertama dan kode iuran diserahkan ke perusahaan untuk dibayar iurannya, iuran dibayar bisa melalui lembaga bank. Indomaret, alfamart dll.
2. Perusahaan yang sudah tercatat namun belum membayar pajaknya sama dengan perusahaan yang baru saja tercatat namun sudah ada datanya di aplikasi perbankan, bisa membandingkan kode pajak perusahaan itu sendiri dengan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan, kami review laporannya setiap hari untuk memastikan keakuratan informasinya.

Keefektifan Sistem informasi Klaim Jaminan Hari Tua Yang Diterapkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang tanjung morawa

Undang-Undang Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Alam Purba: Dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seiring dengan adanya sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan dua lembaga jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk melaksanakan Program Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan pensiun untuk mengembangkan lapangan kerja dan memperoleh upah pekerja.

Sesuai perintah Pasal 5 ayat 2 ayat b ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT sesuai ketentuan peraturan-undangan. Program JHT merupakan bantuan tunai yang diberikan ketika peserta mencapai usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat tetap sehingga tidak dapat bekerja lagi, atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi iuran pembangunan yang dicatat pada rekening individu peserta. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pendaftaran JHT, tata cara pendaftaran, besaran iuran, cara pembayaran iuran, manfaat program JHT, cara pembayaran manfaat JHT, sanksi administrasi, pengawasan dan banding. Manfaatnya sama dengan terkait rekening pengembalian uang tunai, serupa dengan yang dilakukan di sebagian negara besar di dunia.

Menurut ayat 2 pasal 37 UU No. 40 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara, sebagian besar informasi tentang program JHT adalah pengumpulan pembayaran bantuan dan pengembalian dana. Saat ini pada program JHT, hasil investasi yang dikreditkan ke masing-masing rekening ditentukan oleh PT Jamsostek setiap tahunnya dan tidak sama dengan hasil investasi sebenarnya. Program JHT yang akan dilaksanakan saat ini masih dirasakan oleh pegawai swasta, dimana Aturan mengenai hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang JHT, semua aspek dipertimbangkan, termasuk manfaat yang selama ini dirasakan oleh pekerja swasta. Dalam peraturan pemerintah tentang JHT yang akan disusun, amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Jaminan Hari Tua menurut Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015, jaminan hari tua Klaim merupakan prosedur bagi pekerja untuk mencairkan saldo jaminan hari tua.

Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang tanjung morawa

Perhitungan saldo akhir peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara jika peserta berhak mendapatkan jaminan hari tua pada masa muda atau hari tua adalah : Undang-Undang Negara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pada pasal 16 ayat (1) berbunyi: “Asuransi lama bagi pekerja berupah yang bekerja pada pemberi kerja selain manajer pemerintah sebesar 5,7% dari gaji, tetapi : a. 2% menjadi tanggungan pekerja. B. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.

peserta, kadang-kadang peserta melaporkan bahwa kontribusi mereka masih di bawah batas minimum keanggotaan. Kurangnya minat mengembangkan saldo OAS dari BPJS Ketenagakerjaan dapat menyebabkan peserta menarik saldo OAS di usia muda, sehingga saldo tersebut akan bertambah jika tidak ditarik pada saat itu. Kurangnya informasi mengenai manfaat pengembangan neraca disebabkan karena komunikasi tentang manfaat pengembangan neraca yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak signifikan, karena keanggotaannya hanya untuk manajer dan kepala bagian internal perusahaan.

SIMPULAN

Pelaksanaan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang tanjung morawa pada umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya peserta yang melakukan klaim tanpa melampirkan surat keterangan berhenti bekerja. Keefektifan sistem klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang tanjung morawa masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan masih banyaknya peserta yang hanya melakukan klaim melalui kantor cabang dan belum memanfaatkan sarana klaim lain seperti service point atau secara online.

Perhitungan saldo akhir JHT akan lebih menguntungkan bagi peserta jika klaim dilakukan pada masa tua daripada masa muda. Hal ini karena pada saat masa tua, saldo JHT akan lebih besar akibat adanya tambahan bunga pengembangan selama periode kepesertaan. Kurangnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai manfaat bunga pengembangan saldo JHT menyebabkan banyak peserta yang belum memahami manfaat yang akan didapatkan jika klaim dilakukan pada masa tua.

Dengan demikian, diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang tanjung morawa agar tujuan program JHT untuk kesejahteraan peserta di masa tua dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, Indah; Hirawati, Heni. Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2022.
- AZANI, Fahraini, Et Al. Analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2022.
- Oktapianti, Wanda Aulia, Et Al. Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal Inovasi Kesehatan Terkini*, 2024..
- A'yuun, Kurrota, "Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah" Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Abidin, Ali Zainal, "Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014" Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, 2015
- Jogiyanto, H. M., *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI, 2005
 Jogiyanto, *Metodologi: salah kaprah dan pengalaman- pengalaman Yogyakarta: BPFE*, 2009
- Sari, Dessy Maya, "Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Wirnya ningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
 Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan pembayaran Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
 Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 UU No.24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial